



► ELPIJI 3 KG

Pembelian Pakai KTP Dianggap Tak Efektif

Anisatul Umah, Lugas Subarkah, & David Kurniawan
redaksi@jibinews.co

JOGJA—Pemerintah mewajibkan pembeli *liquefied petroleum gas* (elpiji) 3 kilogram (kg) atau gas melon per 1 Juni 2024 sudah terdaftar di pangkalan resmi. Jika belum terdaftar, pembeli harus membawa KTP.

Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi, mengatakan pembelian elpiji 3 kg dengan KTP sama sekali tidak efektif. Sebab KTP tidak menunjukkan siapa saja yang berhak atau tidak mendapatkan subsidi energi. Dia menyarankan agar pemerintah menggunakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) saja.

► Halaman 10

Pembelian Pakai...

Data by name by address yang sudah digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) akan lebih efektif, dan tidak perlu pendataan ulang. "Saya kira KTP tidak tepat kalau tujuannya adalah agar subsidi energi tepat sasaran," ucapnya, Minggu (2/6).

Menurutnya, aturan ini hanya akan merepotkan pangkalan gas. Sementara di warung pembeli masih bisa mengecor elpiji 3 kg tanpa KTP sehingga subsidi ini masih terbuka. "Siapa saja bisa mengakses," kata dia

Fahmy menilai aturan ini juga tidak akan menurunkan besaran subsidi energi untuk gas melon. Sebab potensi salah sasaran juga masih besar. Bahkan dia menyebut aturan ini hanya coba-coba dan bisa dicabut lagi.

Di Kota Jogja, sejumlah penjual sudah menerapkan aturan ini. Salah satu pemilik pangkalan elpiji di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Sri Wahyudi, menjelaskan di tokonya sudah diterapkan penggunaan KTP bagi setiap pembeli sejak lama. "Sudah dari dulu," ujarnya, Sabtu (1/6).

Setiap pemilik KTP dibatasi hanya bisa membeli elpiji satu tabung setiap satu pekan. Adapun jatah tabung yang didistribusikan di pangkalan ini sebanyak 150 tabung dalam seminggu. "Kalau di sini sudah dijatah per minggu," katanya.

Toko yang terletak di sebelah barat Balai Kota Jogja ini sejauh ini bisa menerapkan aturan KTP dengan baik, tidak ada kesulitan dan semua pembeli juga mau mematuhi. "Pembeli ya mau aja, karena butuh," kata dia.

Pemilik toko di Jalan Hayam Wuruk, Bausasran, Umbulharjo, Rofah, mengatakan di tokonya juga sudah menerapkan penggunaan

KTP sejak beberapa waktu lalu. "Iya setiap pembeli wajib membawa KTP," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengeluh karena saat ini sulit mendapat gas elpiji. Di tokonya, ia mengaku sudah sekitar seminggu stok gas elpiji kosong.

Salah seorang warga di Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Wahyudi, mengaku repot dengan kebijakan baru ini. Sabtu pagi kebetulan gas melon di rumahnya habis. Ia pun bergegas ke toko retail tak jauh dari rumahnya.

Sesampainya di toko, ia diminta menunjukkan KTP yang dimiliki guna dicatat dalam proses pembelian. "Beruntungnya saya membawa dan saya menunjukkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Wahyudi, Sabtu siang.

Salah seorang penjaga toko, Yani, mengatakan kebijakan ini ribet. "Sekarang harus mencatat KTP pembeli. Memang ribet, tapi mau bagaimana lagi itu sudah jadi kebijakan. Daripada kena sanksi, kami mengikuti peraturan tersebut," katanya.

Berbasis Teknologi

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengatakan sejak awal 2024 Kementerian ESDM bersama PT Pertamina Patra Niaga menerapkan pendataan berbasis teknologi kepada setiap pengguna elpiji 3 kg.

Langkah ini dilakukan supaya pengguna yang terdaftar secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan menjadi penerima manfaat. Ia menyebut proses transformasi akan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi

ekonomi dan sosial masyarakat.

Ia menjelaskan 1 Juni 2024, menandai *kick off* kewajiban pencatatan berbasis teknologi menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) di setiap pangkalan elpiji.

"Kementerian ESDM akan terus melakukan upaya pengendalian penyaluran elpiji 3 kg, antara lain melalui *monitoring* penyaluran LPG dan implementasi pencatatan transaksi elpiji 3 kg di pangkalan melalui MAP," ungkapnya.

Per 30 April 2024, sudah ada 41,8 juta NIK yang mendaftar, di mana 86% pendaftarnya adalah dari sektor rumah tangga. Selebihnya 5,8 juta NIK dari usaha mikro, 12.800 NIK dari petani sasaran, 29.600 NIK nelayan sasaran, dan 70.300 pengecer elpiji.

Hingga April 2024, realisasi penyaluran elpiji 3 Kg adalah 2,68 juta Metrik Ton (MT) atau 33,38% dari prognosa. Kemudian, dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran harian elpiji 3 kg pada bulan Januari dan Februari 2024 setiap kabupaten/kota dan upaya pengendalian kuota elpiji 3 kg, diproyeksikan penyaluran elpiji 3 kg tahun 2024 sebesar 8,121 juta MT.

Sebelumnya, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah (JBTT), Brasto Galih Nugroho mengatakan jumlah NIK yang sudah mendaftar di Jawa Tengah dan DIY sekitar 8,1 juta. Dia menyebut ini bukan hal baru lagi bagi masyarakat yang sudah terbiasa beli di pangkalan resmi.

Brasto menyebut pengecer juga membeli elpiji 3 kg di pangkalan. Kendala di lapangan adalah masyarakat yang skala usahanya di atas mikro masih membeli elpiji 3 kg. (JIBI/Bisnis.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005